

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**  
**JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**  
**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PRODUKSI BADAN**  
**USAHA MILIK DESA (BUMDes) PANDLEGAN SEJAHTERA PIKATAN**  
**(Studi Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh:

**AYVA NADILA**

**NIM. 12406183147**

**Dosen Pembimbing Lapangan**

**NADIA ROOSMALITA SARI, S.PD., M.KOM.**

**MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Agustus 2021  
Di : Tulungagung  
Judul Laporan : Implementasi Pengelolaan Keuangan Sektor Produksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera Pikatan (Studi Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar)

MENYETUJUI  
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN



**Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.**

NIP. 199109042019032019

MENGENSAHKAN  
a.n. DEKAN  
KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**Siswahyudianto, M.M.**

NIDN. 2015068402

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul kiyamah nanti. Karena atas berkah, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen Keuangan Syariah yang dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera Pikatan Kabupaten Blitar selama satu bulan dari mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Agustus 2021 yang berjudul "**Implementasi Pengelolaan Keuangan Sektor Produksi BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan (Studi Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar)**"

Penyusunan laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Dalam penyusunan laporan ini, tidak sedikit hambatan yang dihadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan laporan ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag. selaku rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Ibu Hj. Amalia Nuril Hidayati, SE., M.Sy. selaku ketua jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
4. Bapak Siswahyudianto, M.M. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
5. Ibu Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan cara virtual (online).
6. Bapak Heriyanto selaku Kepala Desa Pikatan yang telah memberikan izin untuk

melakukan kegiatan PPL di salah satu Lembaga Desa.

7. Bapak Sistupani, M.Pd.I. selaku Pimpinan BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan yang telah memberikan wawasan dan bimbingan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan doa kepada penulis dalam melaksanakan dan menyusun laporan Praktik Pengalaman Lapangan.
9. Teman-teman PPL satu kelompok, yang telah bekerja sama dengan penuh semangat dan sekaligus memotivasi dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan PPL ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan PPL ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penyulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan. Semoga laporan PPL ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tulungagung, 01 Agustus 2021



**Ayva Nadila**

NIM. 12406183147

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan/Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	3
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK</b>	
A. Profil Lembaga.....	5
B. Pelaksanaan Praktik .....	7
C. Permasalahan di Lapangan .....	7
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik.....	8
<b>BAB III PEMBAHASAN TERHADAP TEMUAN STUDI</b>	
A. Implementasi.....	9
B. Pengelolaan Keuangan.....	9
C. Sektor Produksi.....	10
D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	10
E. Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera Pikatan.....	11
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	14
B. Saran .....	14
<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>16</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>22</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Di dalam suatu wilayah, perkonomian merupakan sebuah tumpuan utama dalam kehidupan sehari-hari. Perekonomian dapat tercipta bila suatu usaha yang dibangun mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang akan dibantu dan didukung oleh pemerintahan desa. Pengaturan tentang keuangan desa di dalam Undang-Undang Desa telah jelas mampu memberikan ruang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi desa guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Rintangan yang justru sering muncul dari pengelolaan keuangan yang menuntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam pembangunan desa yang lebih maju.

Keuangan desa dapat berupa hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan dapat digunakan untuk kegiatan pengelolaan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014). Dinilai dari objeknya, keuangan negara adalah segala kewajiban dan hak negara yang dapat diukur dalam mata uang, termasuk kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pengelolaan aset milik negara.<sup>1</sup> Dalam pengelolaan keuangan desa berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama dalam 1 periode.<sup>2</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk hubungan keuangan dengan tingkat pemerintah yaitu dengan pemerintah di tingkat desa dan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Untuk dapat membentuk suatu hubungan keuangan yang sesuai maka keuangan yang ada berdasarkan dengan daerah asal, kewenangan berkala desa, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dan kewenangan kota berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 artinya anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada desa terkait sebagai salah satu instansi penyumbang bentuk pemerintahan sepenuhnya untuk sarana pembangunan dan pemberdayaan desa.<sup>3</sup> Kebijakan yang

---

<sup>1</sup> Naily Rofidah dan Sulis Rochayatun, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondangwangi Wagir Kabupaten Malang)", Jurnal Akuntansi, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 63

<sup>2</sup> Abu Masihad, Skripsi: "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017" (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 35

<sup>3</sup> Komang Eni Candraningsih, dkk, "Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 1, April 2018, hlm. 25

dikeluarkan pemerintah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung semua sektor masyarakat, salah satunya pengalokasian dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dapat memaksimalkan pembangunan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat yang mengelola lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan perekonomian desa. Tujuan BUMDes sendiri adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian. BUMDes berfungsi sebagai lembaga komersial dengan menyediakan sumber daya lokal dan lembaga sosial dengan berkontribusi pada penyediaan layanan sosial.<sup>4</sup> Hal penting lainnya adalah BUMDes bisa mengedukasi masyarakat untuk membiasakan menabung. Dengan melakukan ini, dapat secara mandiri mempromosikan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.

Desa Pikatan secara umum memiliki tanah yang subur sehingga menjadikan sebagian besar rakyat Desa Pikatan menggantungkan hidupnya di bidang pertanian dan peternakan. Pemerintah Desa Pikatan membuat dan melakukan langkah besar dalam mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk budaya yang ada di dalam lingkungan sekitar yang ada, dan membuat rencana jangka panjang untuk memaksimalkan potensi desa. Pemerintah desa telah membuat BUMDes Pandlegan Sejahtera yang didirikan pada tanggal 24 Juli 2020 yang bertujuan mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan adat/ budaya. Dalam BUMDes Pandlegan Sejahtera memiliki beberapa sektor usaha yaitu berupa perdagangan beras yang diproduksi oleh masyarakat setempat secara grosir dan ecer, penjualan air mineral yang dikelola oleh masyarakat sehingga memiliki nama brand sendiri untuk BUMDes tersebut, sektor ruko Pikatan dalam bentuk penyewaan, serta pembangunan tempat nongkrong atau yang dinamakan Cafe Rakai Pikatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan pada laporan ini mengenai **“Implementasi Pengelolaan Keuangan Sektor Produksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera Pikatan (Studi Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar)”**.

---

<sup>4</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”, JDEB, Vol. 13 No. 1, 1 Maret 2016, hlm. 69

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan jurusan Manajemen Keuangan Syariah yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Keuangan Sektor Produksi BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikanan (Studi Desa Pikanan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar)” sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan sektor produksi pada lembaga BUMDes Pandlegan Sejahtera
- b. Untuk mengetahui unit usaha sektor produksi yang terdapat pada BUMDes Pandlegan Sejahtera
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes Pandlegan Sejahtera

### **2. Kegunaan**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini yang diharapkan bagi peneliti adalah mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pelajar maupun mahasiswa terkait dengan pengelolaan dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta memahami dunia usaha perdagangan. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

##### **1) Untuk Mahasiswa**

Dengan adanya laporan penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan menerapkan cara mengelola keuangan suatu lembaga. Sehingga mampu membandingkan teori yang didapat dengan ilmu yang diperoleh dari lembaga. Penelitian ini juga digunakan menunjukkan kemampuan yang telah dipelajari dalam pengelolaan keuangan beserta implementasinya.

##### **2) Untuk BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikanan**

Dengan adanya laporan penelitian ini, BUMDes diharapkan mengimplementasikan pengelolaan keuangan sektor produksi yang terdapat di BUMDes. Sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan BUMDes.



3) Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Laporan penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian-penelitian selanjutnya. Menjalinkan kerjasama yang baik antara pihak kampus dengan lembaga desa yang dijadikan sebagai lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Sehingga kegiatan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat berkembang.

**C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

**1. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Keuangan Syariah gelombang II Tahun 2021 adalah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 s/d 13 Agustus 2021.

**2. Tempat Pelaksanaan**

Tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang II Tahun 2021 berada di Lembaga Badan Usaha Milik Desa Pikatan yang beralamat di Jalan Raya Pikatan No.19 Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan melakukan wawancara dan observasi.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK**

#### **A. Profil Lembaga**

##### **1. Profil dan Data Kelembagaan BUMDes Pandlegan Sejahtera Desa Pikatan**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera ini di mulai berdiri pada tanggal 24 Juli 2020 yang berada di Jalan Raya Pikatan Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dengan No. Telp: 085850762010. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera ini adalah lembaga perekonomian yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat yang didasari agar masyarakat yang ada di Desa Pikatan bisa mengembangkan unit-unit usahanya dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang sesuai dengan adat setempat. Sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa yang berorientasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Lembaga ini tergolong masih baru sehingga usaha yang di kelola masih sedikit dan masih minim daya minat dari masyarakatnya, maka diperlukannya tindaklanjut lagi dari pihak pengelola BUMDes.

##### **Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

###### 1) Profil Umum

- a) Nama BUMDes : Pikatan Pandlegan Sejahtera
- b) Tanggal Berdiri : 24 Juli 2020
- c) Alamat Lengkap : Desa Pikatan Jln.09 Kecamatan Wonodadi  
Kabupaten Blitar
- d) No.Telp : 0881036774117
- e) Email : [bumdespandlegansejahtera@gmail.com](mailto:bumdespandlegansejahtera@gmail.com)
- f) No. NPWP : 957232788653000

###### 2) Susunan Pengurus

- a. Penasehat : Heriyanto

- b. Pelaksana Operasional : Sistupani. M.Pd.I
- c. Sekretaris : M. Shoqif Ichwanudin
- d. Bendahara : Mulyadi
- e. Anggota : - Fitriyatul Naharin  
- Mustofa  
- Miftahul Farihin

3) Susunan Pengawas

- a. Dari Ketua BPD : Edy Haryono
- b. Dari Sekretaris Desa : Fuad Fauzi Wahyudiani

4) Kegiatan Usaha Yang Sedang Berjalan Saat ini

- a. Sektor Air Mineral
- b. Sektor Beras Grosir dan Eceran
- c. Sektor Ruko Pikatan
- d. Sektor Cafe Rakai Pikatan

**2. Visi dan Misis BUMDes Pandlegan Sejahtera Desa Pikatan**

**a. Visi BUMDes Pandlegan Sejahtera Desa Pikatan**

*“Meningkatkan Pendapatan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa”*

**b. Misi BUMDes Pandlegan Sejahtera Desa Pikatan**

1. Meningkatkan pendapatan desa
2. Mengembangkan perekonomian desa
3. Meningkatkan modal usaha BUMDes
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan asset desa
6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa

## **B. Pelaksanaan Praktik**

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 s/d 13 Agustus 2021 oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung jurusan Manajemen Keuangan Syariah memfokuskan pada lembaga perekonomian di wilayah setempat yang salah satunya adalah lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Kegiatan PPL gelombang II hanya melakukan observasi dan wawancara dengan pihak lembaga terkait. Hal ini dikarenakan atas aturan pemerintah yang memberlakukan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutuskan rantai penyebaran *covid-19*.

Kegiatan PPL yang dilakukan oleh peneliti sangatlah terbatas. Disini penulis melakukan kegiatan secara langsung ke lapangan hanya 3 kali selama bulan. Pada pertemuan pertama, melakukan wawancara untuk menggali informasi yang jelas terkait BUMDes Pandlegan Sejahtera dengan mendatangi rumah salah satu pengelola BUMDes Pandlegan Sejahtera yang sebelumnya telah membuat janji dengan beliau via online. Kemudian pertemuan kedua, melakukan observasi terkait program unit atau jenis usaha yang ada di BUMDes Pandlegan Sejahtera. Lalu pertemuan ketiga, peneliti melanjutkan dokumentasi serta observasi yang belum terselesaikan. Selama tidak melakukan wawancara dan observasi peneliti menyelesaikan laporan akhir yang akan dikumpulkan di akhir PPL selesai.

## **C. Permasalahan di Lapangan**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan ditemui sejumlah permasalahan yang dihadapi di lapangan, karena BUMDes Pandlegan Sejahtera sempat mengalami vakum sebelum masa perpindahan kepengurusan yang saat ini. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu:

1. BUMDes Pandlegan Sejahtera masih terkendala dengan terbatasnya dana yang ada.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari BUMDes Pandlegan Sejahtera karena masih baru dalam kepengurusan setelah pergantian kepengurusan sehingga belum mampu beroperasi secara maksimal dan SDM dari BUMdes Pandlegan Sejahtera butuh pengalaman dalam bidang administrasi maupun

pengelolaan dana.

3. Banyak masyarakat yang masih awam atau belum mengetahui tentang BUMDes Pandlegan Sejahtera.
4. Kurang dalam pengembangan usaha BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan.
5. Lokasi yang digunakan sektor Cafe Rakai Pikatan kurang strategis.

#### **D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik**

Tanggapan pihak BUMDes Pandlegan Sejahtera terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan berusaha untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang dilakukan secara baik dan benar. Dalam penanganan terkait Sumber Daya Masyarakat (SDM) masyarakat Desa Pikatan, pihak BUMDes akan melibatkan dan mengikutsertakan pihak pemuda desa dalam kegiatan BUMDes. Karena mereka berfikir anak muda pastinya memiliki inovasi dan ide kreatif untuk mengembangkan usaha.

## BAB III

### PEMBAHASAN PADA TEMUAN STUDI

#### A. Implementasi

Implementasi adalah Tindakan atau menjalankan rencana yang telah dipersiapkan secara hati-hati. Implementasi biasanya terjadi setelah rencana dianggap selesai. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan menghasilkan adanya suatu kegiatan, tugas, atau mekanisme sistem. Implementasi bukanlah suatu kegiatan yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan output dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai bagian dari upaya implementasi kebijakan tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana suatu kebijakan dapat melakukan satu atau lebih kegiatan, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan tujuan dan maksud dari kebijakan itu sendiri.

#### B. Pengelolaan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah suatu proses yang membantu menentukan kebijakan dan tujuan dari organisasi, dan juga merupakan proses yang memantau segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>7</sup> Manajemen keuangan merupakan segala hal yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.<sup>8</sup> Terdapat empat prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi focus perhatian dalam UU, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Anggaran Berbasis Kinerja”, yang saat ini dalam operasi

---

<sup>5</sup> Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

<sup>6</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, “*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21

<sup>7</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi IV*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

<sup>8</sup> Kasmir, “*Pengantar Manajemen Keuangan*”, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5

percontohan dan diharapkan dimulai pada tahun 2005.

2. Keterbukaan dan semua transaksi keuangan pemerintah.
3. Mengembangkan keterampilan manajer profesional
4. Adanya lembaga audit eksternal yang kuat, profesional dan independen serta pencegahan duplikasi dalam pelaksanaan audit (*double accounting*).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa pendapatan desa adalah uang yang masuk ke rekening keuangan desa.<sup>9</sup> Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri adalah dana yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah/kota untuk suatu kota dan dihimpun dari sebagian dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diterima daerah/kota.<sup>10</sup>

### C. Sektor Produksi

Sektor produksi atau sektor penghasil barang (*good sectors*) mendorong perkembangan sektor yang lain. Adapun sektor produksi tersebut berasal dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Sektor produksi pertanian dan industri dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan inklusif. Secara khusus, dampak pembangunan terbesar adalah industri beras dan industri pemasok makanan dan minuman.<sup>11</sup>

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Di sektor pertanian, agenda pembangunan nasional tidak hanya terfokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, kesempatan kerja, inventarisasi, dan pertumbuhan ekspor pada pertanian di pedesaan. Hingga saat ini, sektor pertanian tidak hanya menyediakan banyak lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi negara.

### D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>10</sup> Anik Yuesti dan Putu Kepramareni, “*Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*”, (Bali: CV. Noah Aletheia, 2019), hlm. 117

<sup>11</sup> Visi Saujaningati Kristyanto, “*Analisis Sektor Produksi Pendorong Terwujudnya Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur*”, Jurnal Ilmiah, 2015, hlm. 14

didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>12</sup> Pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu perwujudan dalam pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan cara *kooperatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntabel* dan *sustainable*. Sehingga apabila dikelola dengan serius dapat menjadikan lembaga tersebut berjalan dengan efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggara kegiatan ekonomi desa.
3. Mendukung pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber daya alam dan potensi manusia untuk berkembang menjadi sumber daya ekonomi.
4. Menjadi media pemerintah desa dalam mewujudkan rencana pembangunan yang secara khusus di bidang ekonomi.

#### **E. Implementasi Pengelolaan Keuangan Sektor Produksi BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan**

Mengelola keuangan dengan baik merupakan salah satu hal yang penting saat memiliki usaha. Bisnis yang sehat membutuhkan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan perusahaan berkaitan dengan pembiayaan modal kerja, penggunaan dan alokasi dana, dan bagaimana mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Laporan keuangan digunakan oleh pihak luar untuk memperoleh informasi tentang status suatu perusahaan, keputusan yang diambil oleh investor, dan kinerja suatu perusahaan atau badan hukum.

BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan dikelola secara mandiri dan profesional. Tentunya sebagai sebuah organisasi juga harus mencari keuntungan, ada mekanisme dimana para pengelola BUMDes harus bekerja sama dengan pihak lain. Pengelolaan dan pelaporan BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan dilakukan secara transparan. Kunci dalam mengelola BUMDes yaitu proses pengelolaan BUMDes yang amat sangat membutuhkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya, pengelolaan dan pelaporan harus benar-benar transparan dan terbuka agar ada mekanisme kontrol dan penyeimbang baik dari pemerintah desa

---

<sup>12</sup> Samjulaifi, Skripsi: “*Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*” (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hlm. 3

<sup>13</sup> David Prasetyo, “*Peran BUMDES dalam Membangun Desa*”, (Pontianak: CV. DERWATI PRESS, 2019), hlm. 60



maupun masyarakat.<sup>14</sup> Para pengelola dan pengurus BUMDes sangat terbuka akan kritik dan saran dari masyarakat. BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan menunjukkan bahwa prinsip transparansi berjalan dengan baik, karena segala informasi disampaikan dengan baik.

Dalam penelitian ini masih banyak kendala yang harus dialami oleh BUMDes, yaitu.

1. Masalah mengenai dana, BUMDes Pandlegan Sejahtera ini tergantung dari alokasi dana desa yang mana dana tersebut berasal dari jenis usaha sektor air mineral, sektor beras grosir dan eceran, sektor ruko Pikatan, sektor Cafe Rakai Pikatan. Di situasi pandemi seperti ini membuat penghasilan dari BUMDes menurun. Hal ini dikarenakan daya minat dan daya konsumsi masyarakat menurun.
2. Masalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), pihak pengelola BUMDes Pandlegan Sejahtera memang sudah dibidang telah cukup memadai, namun dari pihak pengelola setiap jenis usaha yang dimiliki belum memadai dan perlu ditingkatkan agar usaha yang dikelola mampu berjalan sesuai dengan rencana dari pihak BUMDes
3. Masalah mengenai masih awamnya masyarakat terhadap BUMDes Pandlegan Sejahtera, tidak adanya sosialisasi terkait jenis usaha BUMDes. Sehingga membuat masyarakat kurang faham dengan BUMDes.
4. Masalah mengenai pengembangan BUMDes, BUMDes Pandlegan Sejahtera pernah mengalami vakum di saat pergantian masa kepengurusan membuat kurang faham dengan pengelolaan BUMDes sehingga pengelolaan BUMDes dan pengelolaan keuangannya menjadi tidak terkoordinir.
5. Masalah terkait lokasi Cafe Rakai Pikatan. Lokasi Cafe Rakai Pikatan awalnya berada di lokasi yang kurang strategis, lokasi tersebut terlalu kecil, sempit, kurang nyaman untuk tempat nongkrong para pemuda desa, dan agak menjorok ke dalam. Sehingga membuat lokasi cafe tidak terlihat jelas.

Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh BUMDes Pandlegan Sejahtera, namun mereka telah membuat langkah untuk mengendalikan masalah tersebut. Yaitu yang pertama, membuat inovasi untuk Cafe Rakai Pikatan, mereka telah memindahkan

---

<sup>14</sup> Komang Eni Candraningsih, dkk, “*Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan*”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol. 8 No. 1, April 2018, hal. 25-26

lokasi cafe ke tempat yang lebih luas, mudah dijangkau oleh sehingga membuat masyarakat lebih leluasa untuk menikmati suasana setempat. Yang kedua, mengikuti pelatihan untuk pengelola BUMDes dan pengurus usaha untuk mengembangkan usaha BUMDes. Yang ketiga, membuat laporan keuangan yang dapat dilihat oleh semua orang sehingga menjadi lebih terkoordinir dan bersifat transparan.

Dari uraian di atas implementasi dari program yang dimiliki oleh BUMDes Pandlegan Sejahtera sudah berjalan dengan baik. Dan hanya membutuhkan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, agar program BUMDes mampu berjalan secara optimal dan maksimal dari sebelumnya. Kerja sama antara pihak pengelola BUMDes dan pengurus usaha sangatlah penting untuk memajukan BUMDes.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala yang dialami oleh BUMDes Pandlegan Sejahtera Pikatan. Beberapa kendala yang dialami yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari pengelola BUMDes dan pengurus usaha, lokasi Cafe Rakai Pikatan yang kurang strategis untuk dijangkau oleh masyarakat, masyarakat yang masih awam akan BUMDes, kurangnya pengembangan yang dikarenakan sempat vakum saat pergantian pengurus sehingga membuat laporan keuangan yang tidak terkoordinir, terbatasnya dana yang ada dari BUMDes. Dana yang digunakan sendiri masih bergantung pada alokasi dana desa yang mana berasal dari program usaha yang dimiliki oleh BUMDes. BUMDes Pandlegan Sejahtera berdiri pada tahun 2020 yang menjalankan 4 sektor usaha, yaitu sektor air mineral, sektor beras grosir dan eceran, sektor ruko Pikatan, dan sektor Cafe Rakai Pikatan. BUMDes ini didasari agar masyarakat yang ada di Desa Pikatan bisa mengembangkan setiap unit usahanya dan mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada keuntungan.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Pandlegan Sejahtera adalah secara transparan yang artinya pengelolaan dan pelaporan keuangan secara terbuka. Para pengelola dan pengurus BUMDes sangat terbuka akan kritik dan saran dari masyarakat. Program usaha BUMDes sudah berjalan secara baik, namun perlu peningkatan dan pengembangan untuk mencapai hasil yang maksimal.

#### **B. Saran**

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan selalu menjaga hubungan baik dengan pihak lembaga yang digunakan sebagai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Sehingga dapat terjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan secara baik.

2. Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera Pikatan

BUMDes Pandlegan Sejahtera diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Selain itu, mengembangkan program unit usaha yang dimiliki sehingga mendapatkan hasil yang maksimal untuk kedepannya.

3. Untuk Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan bisa menggali ilmu yang didapat selama melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Serta lebih professional dan lebih mempersiapkan diri dalam melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. JDEB. 13(1): 69
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi IV*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana
- Komang Eni Candraningsih, dkk. 2018. *Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. 8(1): 25.
- Kristyanto, Visi Saujaningati. 2015. *Analisis Sektor Produksi Pendorong Terwujudnya Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah
- Masihad, Abu. 2018. “*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Prasetyo, David. 2019. *Peran BUMDES dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV. DERWATI PRESS
- Samjulaifi. 2020. “*Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*”. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Purwanto, dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rofidah, Nailly dan Sulis Rochayatun. 2020. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondangwangi Wagir Kabupaten Malang)*. Jurnal Akuntansi. 11(1): 63
- Yuesti, Anik dan Putu Kepramareni. 2019. *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*. Bali: CV. Noah Aletheia

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

### PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG

#### II

#### JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

#### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

#### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

#### TAHUN 2021

Pada tanggal 12 Juli sampai tanggal 13 Agustus Tahun 2021, bertempat di BUMDes Pandlegan Sejahtera Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah dilaksanakan PPL Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang II Tahun 2021 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Ayva Nadila  
NIM : 12406183147  
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah  
Lembaga PPL : BUMDes Pandlegan Sejahtera

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	KEGIATAN
1.	Senin, 12 Juli 2021	09.00 WIB	Mempelajari isi buku pedoman PPL
2.	Selasa, 13 Juli 2021	08.30 WIB	Mengikuti Kegiatan pembekalan materi via zoom dan membuat janji dengan ketua BUMDes via online untuk melakukan wawancara
3.	Rabu, 14 Juli 2021	10.00 WIB	Review materi pendalaman PPL
4.	Kamis, 15 Juli 2021	16.00 WIB	Membuat pertanyaan yang akan digunakan untuk observasi/wawancara

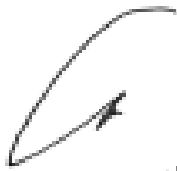
5.	Jum'at, 16 Juli 2021	09.30 WIB	Mendatangi ke tempat lembaga daan bertemu dengan Bapak Sistupani selaku ketua BUMDes Pandlegan Sejahtera
6.	Sabtu, 17 Juli 2021	13.00 WIB	Menyiapkan beberapa judul laporan PPL
7.	Minggu, 18 Juli 2021	20.00 WIB	Review Pendalaman materi
8.	Senin, 19 Juli 2021	10.00 WIB	Mencari referensi jurnal yang sesuai dengan judul
9.	Selasa, 20 Juli 2021	11.00 WIB	Membuat cover dan halaman pengesahan
10.	Rabu, 21 Juli 2021	14.30 WIB	Mencari jurnal yang sesuai
11.	Kamis, 22 Juli 2021	19.00 WIB	Berkomunikasi dengan DPL tentang persetujuan judul laporan PPL
12.	Jum'at, 23 Juli 2021	15.00 WIB	Mereview pendalaman materi
13.	Sabtu, 24 Juli 2021	11.00 WIB	Merevisi judul laporan yang telah dikonsultasikan
14.	Minggu, 25 Juli 2021	20.00 WIB	Mencari referensi jurnal sekaligus mengerjakan BAB I untuk dasar pemikiran
15.	Senin, 26 Juli 2021	19.00 WIB	Membuat perencanaan untuk materi yang akan dibahas dalam laporan
16.	Selasa, 27 Juli 2021	15.00 WIB	Review Pendalaman Materi PPL

17.	Rabu, 28 Juli 2021	10.00 WIB	Berkomunikasi dengan bapak Sistupani untuk menanyakan terkait jadwal kegiatan wawancara
18.	Kamis, 29 Juli 2021	18.00 WIB	Menyusun laporan pada BAB I tujuan dan kegunaan
19.	Jum'at, 30 Juli 2021	09.00 WIB	Pengambilan video dan mengolah informasi yang telah didapatkan melalui wawancara
20.	Sabtu, 31 Juli 2021	11.00 WIB	Menyusun laporan BAB I di waktu dan tempat pelaksanaan
21.	Minggu, 01 Agustus 2021	20.00 WIB	Mereview pendalaman materi
22.	Senin, 02 Agustus 2021	08.00 WIB	Menyusun laporan pada BAB II Pelaksanaan Praktik
23.	Selasa, 03 Agustus 2021	13.00 WIB	Menganalisis beberapa jurnal dan buku yang akan digunakan acuan untuk pengerjaan laporan
24.	Rabu, 04 Agustus 2021	19.00 WIB	Menyusun laporan BAB III Pembahasan pada temuan studi
25.	Kamis, 05 Agustus 2021	18.00 WIB	Melanjutkan menyusun laporan BAB III
26.	Jum'at, 06 Agustus 2021	15.00 WIB	Membuat rencana terkait video yang diedit sekaligus travelling
27.	Sabtu, 07 Agustus 2021	09.00 WIB	Konsultasi kelanjutan program kegiatan PPL dengan DPL
28.	Minggu, 08 Agustus 2021	14.00 WIB	Menyusun laporan pada BAB IV Pentup dan Daftar Pustaka
29.	Senin, 09 Agustus 2021	10.00 WIB	Membuat video presentasi laporan PPL



30.	Selasa, 10 Agustus 2021	22.00 WIB	Melengkapi kekurangan yang ada dalam laporan
31.	Rabu, 11 Agustus 2021	21.00 WIB	Editing video
32.	Kamis, 12 Agustus 2021	16.00 WIB	Editing video

Tulungagung, 13 Agustus 2021



Ayva Nadila

NIM.12406183147

## BERITA ACARA KONSULTASI

Nama : Ayva Nadila

NIM : 12406183147

Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

Nama DPL : Nadia Roosmalita Sari, SP, M.kom

Tempat PPL : BUMDes Panglegan Sejahtera

Judul Laporan : Implementasi Pengelolaan Keuangan Sektor Produksi Badan Usaha Milik  
Desa (BUMDes) Pandlegan Sejahtera Pikatan (Studi Desa Pikatan,  
Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar)

No.	Hal yang dikonsultasikan	Catatan DPL	Paraf
1.	Mengkonsultasikan judul laporan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Perbaiki judul laporan yang lebih singkat dan mengacu pada pengambilan topik	
2.	Konsultasi terkait progress dan kendala terkait kegiatan PPL	Disetujui	
3.			
4.			

Tulungagung, 13 Agustus 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan



**Nadia Roosmalita Sari, S.Pd, M.Kom**

NIP. 199109042019032019

## LAMPIRAN

Gambar 1. Produk Beras



Gambar 2. Produk Air Mineral Galon



Gambar 3. Cafe Rakai Pikatan



Gambar 4. Produk Air Mineral Kemasan Botol



Gambar 5. Wawancara Pengurus BUMDes



Gambar 6. Lokasi Depot Air BUMDes



**Nama : Ayva Nadila**

**Nim : 12406183147**

**Kelas : MKS-6C**

### **Resume Pendalaman Materi PPL Gelombang II Tahun 2021**

Pendalaman Materi PPL Gelombang II IAIN Tulungagung yang dilaksanakan pada tanggal Selasa, 13 Juli 2021 dengan menggunakan via virtual berupa zoom dan youtube. Virtual berupa zoom hanya diikuti oleh perwakilan peserta PPL di masing-masing Dosen Pembimbing Lapangan yang telah ditentukan, sedangkan youtube bisa diakses oleh seluruh mahasiswa yang melaksanakan PPL Gelombang II. Acara ini diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh kepala Laboratorium FEBI yaitu Bapak Siswahyudianto, M.M, lalu dilanjutkan oleh sambutan Dekan FEBI Bapak Dr. Dede Nurohman, M. Ag. Dan dilanjutkan oleh pembicara yang sangat hebat yaitu:

#### **A. Pembicara Pertama Bapak Anang Mustofa, S.E**

Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah  $\pm 244,5$  Ha, luas pertanian 221 Ha dan luas perumahan 23 Ha. Batas wilayah desa, yaitu di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Gesikan, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Boyolangu, sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Bono, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Ngranti.

Kendalbulur adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Desa Kendalbulur terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Kendalbulur, Dusun Genting, Dusun Rongganan. Dan terdiri dari 7 Rukun Warga dan 22 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1883 dan perempuan sebanyak 1866 dan jika ditotal keseluruhan sebesar 3749 jiwa, dan terdiri dari 1177 KK (Kartu Keluarga).

Desa Kendalbulur dipimpin oleh Bapak Anang Mustofa, S.E selaku Kepala Desa Kendalbulur, Bapak Ichwan Nursalim selaku Ketua BPD, Bapak Drs. Adri Wiyono selaku Ketua LPM, dan Ibu Suprihatin, S.Pd selaku Direktur BUMDesa.

Lembaga-lembaga yang terdapat di dalam desa atau bisa disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi LPM (Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat), RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Forum Anak Desa (FAD), dan Lembaga Adat Desa.

*“Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”*

*-Bung Hatta-*

Kedaulatan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini tampak tegas disebutkan dalam definisi Desa menurut UU Desa yaitu bahwa Desa dalam batas wilayahnya berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### **Perbedaan desa tempo dulu dan sekarang:**

1. UU No. 32/2004 – PP No. 72/2005
  - a. Dasar Konstitusi: UUD 1945 Pasal 18 ayat 7
  - b. Visi – Misi: Tidak ada
  - c. Asas: Desa menjadi bagian dari desentralisasi
  - d. Kedudukan: Desa berada dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - e. Musyawarah Desa: Tidak ada
2. UU tentang Desa No. 06 Tahun 2014
  - a. Dasar Konstitusi: UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7
  - b. Visi – Misi: Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
  - c. Asas: Asas utama yaitu rekognisi dan subsidiaritas
  - d. Kedudukan: Desa berada dalam wilayah kabupaten/kota
  - e. Musyawarah Desa: Sebagai forum bersama (pemerintah desa, BPD, dan masyarakat) yang diselenggarakan BPD untuk menyepakati hal-hal strategis

#### **Perubahan Paradigma “Desa Membangun”**

- Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas.
- Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat.
- Ketiga, desa berperan sebagai subyek pembangunan.

**Hak Asal – Usul:** Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Sistem Organisasi Masyarakat Adat
2. Kelembagaan
3. Pranata dan Hukum Adat
4. Tanah Kas Desa
5. Kesepakatan dalam Kehidupan Masyarakat Desa

**Kewenangan Lokal Berskala Desa:** Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain:

1. Tambatan Perahu
2. Pasar Desa
3. Tempat Pemandian Umum
4. Saluran Irigasi
5. Sanitasi Lingkungan
6. Pos Pelayanan Terpadu
7. Sanggar Seni dan Belajar
8. Perpustakaan Desa
9. Embung Desa
10. Pengelolaan Air Minum Pedesaan
11. Jalan Desa

### **Hakekat dan Tujuan Pembangunan Desa**

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia
2. Meningkatkan pelayanan publik di desa
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

## **Kebijakan dan Strategi dalam RPJM 2020-2024**

Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:

- Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif.
- Penetapan batas desa.
- Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama.
- Peningkatan pelayanan dasar desa.
- Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa.
- Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

## **Potensi Desa Kendalbulur dalam Desa Digital**

1. Letak desa strategis
2. 200 lebih rumah warga sudah berlangganan jaringan internet
3. 99% rumah warga memiliki gadget/smartphone
4. 21 warkop free wifi, 4 mushola free wifi, 1 poskamling free wifi
5. Kantor desa, sekolahan, poskesdes & BUMDes sudah free wifi
6. Sumber daya manusia

## **B. Pembicara Kedua Bapak Haris Susianto, SH., M.Si**

### **Tugas Pokok dan Fungsi DISNAKER**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan uang. Membahas tentang pekerjaan tentunya setiap manusia ingin mencari pekerjaan yang mudah serta layak untuk dirinya sendiri. Hal ini pada umumnya ketenagakerjaan merupakan salah satu yang perlu dipelajari sebelum seseorang melakukan pekerjaan. Seperti halnya ada banyak siswa-siswi atau mahasiswa yang setelah menjalankan pendidikan selain ingin mendapat ilmu dan wawasan juga hanya sebatas untuk modal kedepannya mencari pekerjaan yang layak. Hal ini karena kerja adalah suatu pilihan. Seperti halnya kerja di kantor atau instansi

pemerintah maupun di instansi swasta. Dari salah satu motivasi yang bisa menginspirasi yaitu bekerja sambil berwirausaha. Tentunya dalam melakukan hal tersebut diperlukan kemauan dan kata-kata dalam melakukannya untuk menjadi sukses.

Di dalam program kegiatan yang menjadi istilahnya superioritas dan inferioritas di masing-masing perangkat daerah yang kenapa terkait dengan ketenagakerjaan sangat penting dan merupakan kan kan an-naba dan bukti aturan dalam undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pada istilahnya antara kerja lokal dan antara kerja daerah situ juga yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sesuai didalam undang-undang. Selain itu ada undang-undang 18 khususnya yaitu pekerjaan grasi indonesia ini ada transisi hutan yang lebih bermartabat kepada pekerjaan migrasi indonesia

Ketenaga ketenagakerjaan biasanya memiliki isu-isu strategi dan rencana strategis dalam membangun ketenagakerja dalam berwirausaha. Ada beberapa isu-isu didalam ketenaga kerjaan yang sering muncul yaitu ada lima isu-isu strategi dan rencana strategis yang meliputi:

- a. Kualitas kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan
- b. Kualifikasi tenaga kerja masih banyak yang belum bisa diterima pasar kerja
- c. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal
- d. Penerapan dan penegakan hukum normal ketenagakerjaan belum optimal
- e. Konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh

Dalam isu pada strategi dan perencanaan strategis untuk membangun ketenagakerja dalam berwirausaha perlu adanya pengetahuan tentang bagaimana ketenagakerjaan sebelumnya. Sehingga perlu adanya pembangun kewirausahaan untuk membangun ketenaga kerjaan yang unggul.

Di dalam kewirausahaan ada juga pelatihan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha yang kompetent dalam mengelola usahanya agar tidak selalu mengandalkan pekerjaan di suatu instansi dan agar bisa mendirikan perusahaannya sendiri melalui berwirausaha. Ada beberapa pelatihan kompetensi dan kewirausahaan yang dapat diikuti meliputi:

- a. pelatihan usaha

Pada pelatihan kewirausahaan ini disesuaikan dengan potensi yang ada di desanya.

- b. Sasaran atau modal



Hal ini bantuan sasaran atau modal ditujukan untuk memulai usaha.

c. Pendampingan

Pada pendampingan usaha oleh tenaga pendamping yang kompeten sangat diperlukan.

d. Pemasaran

Bantuan penyaluran produk-produk lokal unggulan Desa ke pasar yang lebih luas.

